

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* DALAM PENUNTASAN KEMISKINAN DI DESA SUNGAI KUNYIT HULU KABUPATEN MEMPAWAH

Doef^{1,*}, Willy Tri Hardianto², Agung Suprojo³

^{1,2,3}Program Studi Magister Administrasi Publik, Sekolah Pascasarjana Universitas Tribhuwana Tunggaladewi, Malang, Indonesia

doef2015@gmail.com^{1,*}, willytrihardianto@yahoo.co.id², asuprojo5@gmail.com³

ABSTRAK

Salah satu program pembangunan yang telah dijalankan secara serius oleh Pemerintah Indonesia adalah *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa. Program ini memodifikasi konsep SDGs global yang telah dicetuskan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 25 September 2015. Apabila SDGs global memiliki 17 poin utama untuk menciptakan skema kehidupan berkelanjutan, maka pokok permasalahan yang ada Mempawah kurang peran aktif dari aparat pemerintah desa dalam implementasi kebijakan SDGs sendiri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah ada terapan yang dilakukan secara efektif melalui kebijakan ataupun dengan proram. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Bogdan Dan Taylor dalam Moleong (2014:4) penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati menurut mereka pendapat ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh). Hasil dari penelitian ini implementasi kebijakan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam penuntasan kemiskinan di Desa Sungai Kunyit Hulu Kabupaten Mempawah setelah melihat langsung berjalan efektif meskipun hanya bergantung hanya keberap personalia saja. Maka sara peneliti harus lebih berperan aktif dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Kata Kunci : sustainable development goals; penuntasan kemiskinan

ABSTRACT

One of the development programs implemented seriously by the Indonesian Government is the Village Sustainable Development Goals (SDGs). This program modifies the global SDGs concept initiated by the United Nations (UN) on September 25 2015. Suppose the global SDGs have 17 main points to create a sustainable living scheme. In that case, the main problem that exists in Mempawah is the lack of active role of village government officials in implementing policies SDGs themselves. This research aims to find out whether applications are carried out effectively through policies or programs. This type of research uses qualitative research. According to Bogdan Dan Taylor in Moleong (2014: 4) qualitative research is a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and behavior that can be observed. According to them, this opinion is directed holistically at the setting and the individual (intact). The results of this research are the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) policy in alleviating poverty in Sungai Kunyit Hulu Village, Mempawah Regency, after seeing firsthand that it is effective even though it only depends on a few personnel. So researchers must play a more active role in implementing this policy.

Keywords: sustainable development goals; poverty alleviation

PENDAHULUAN

Salah satu program pembangunan yang telah sijalankan secara serius oleh Pemerintah Indonesia adalah *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa. Program ini memodifikasi konsep SDGs global yang telah dicetuskan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 25 September 2015. Apabila SDGs global memiliki 17 poin utama untuk menciptakan skema kehidupan berkelanjutan, SDGs Desa mengajukan 18 pokok yang merujuk pada adaptasi lokalitas. Perpanjangan SDGs dari PBB menjadi SDGs Desa tentu memiliki tujuan spesifik. Pada dasarnya, konsep SDGs memang harus bisa diimplementasikan secara menyeluruh, konsisten, dan tepat sasaran. Oleh karena itu, pemahaman komprehensif mengenai wilayah yang hendak dibangun merupakan hal wajib. SDGs hanya bisa dicapai secara utuh dengan lokalisasi nilai dan pokok setiap program (Servaes, 2017).

Desa di Indonesia, masih menjadi wilayah yang cukup sulit diurai ia kerap dinarasikan tertinggal dalam urusan pembangunan. Berbagai program masih berorientasi pada pusat (sentralistik). Akibatnya, daerah pinggir seperti desa yang sesungguhnya memiliki potensi yang bisa dimajukan justru hanya mendapatkan kesenjangan. Desa serta-merta dipandang sebagai wil ayah kelas bawah yang menopang hidup kota. Berbagai sumber daya yang ada pun dieksploitasi alihalih dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Kondisi ini tentu sangat disayangkan. Pasalnya, desa memiliki sumber daya alam yang melimpah, potensi budaya yang kaya, dan manusia yang bisa diberdayakan. Pada titik ini, SDGs Desa menjadi hal yang penting. Untuk mengimplementasikannya, kerja sama dari berbagai pihak dibutuhkan termasuk perguruan tinggi. Sebagai institusi pendidikan yang memiliki modal intelektual paling besar, perguruan tinggi wajib berpartisipasi aktif dalam pelbagai program SDGs. Bersandar pada Tri Dharma, perguruan tinggi bisa turut serta dari mulai menggali data, menganalisis masalah, hingga merumuskan konsep pemberdayaan dalam masyarakat. Proses-proses semacam ini sangat penting untuk memajukan potensi desa (Wahyudin, 2015).

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bahkan telah merumuskan secara lebih detail. Di bawah payung Kampus Merdeka, perguruan tinggi akan dilibatkan untuk semakin membaaur dengan pemberdayaan masyarakat desa. Ada tiga aspek yang diutamakan: 1) merdeka belajar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, 2) merdeka belajar untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama (BUMDesMa), dan 3) merdeka belajar pemenuhan 18 tujuan SDGs Desa. Ketiga aspek tersebut merujuk pada konsep pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat selaras dengan Tri Dharma perguruan tinggi.

Apabila diterapkan secara menyeluruh, peran perguruan tinggi melalui SDGs Desa tentu akan semakin bisa dirasakan masyarakat. Berbagai penelitian yang selama ini sudah dilakukan bisa dijadikan pijakan. Dengan data-data yang terukur, pola pikir dan skema kehidupan masyarakat bisa diperbaiki. Berbagai dampak positif, mulai dari sektor pendidikan, ekonomi, dan budaya, akhirnya bisa dirasakan bersama (Suryana, 2018).

Salah satu strategi agar tidak jatuh Tarik menarik substansi dan proses pembangunan, ialah memastikan seluruh substansi dan proses pembangunan ada di suatu wilayah atau sekelompok masyarakat. Secara khusus ada tujuan - tujuan yang diarah pada pemanfaatan dari warga. yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan, menghilangkan kelaparan, menjamin kehidupan seluruh Indonesia. (A. Halim Iskandar, 2020). Dalam implementasi kebijakan SDGs ini ada beberapa masalah yang menjadi penghalang dalam pelaksanaannya yang pertama kurangnya personalia yang berpartisipasi dalam mengimplementasikan kebijakan SDGs tersebut, karena personalia khususnya yng ada dikantor desa sungai kunyit hulu ini hanya Sebagian saja yang ikut andil dalam pelaksanaan pengimplementasian kebijakan SDGs dikarenakan hanya beberapa orang saja perangkat desa yang aktif dan faham dikantor desa tersebut dan juga kurangnya partisipasi masyarakat , sehingga hal itu menjadi salah satu masalah yang saat ini terjadi dalam desa sungai kunyit hulu.

Yang kedua masalah yang menjadi penghambat dalam proses implementasi kebijakan SDGs di desa sungai kunyit hulu adalah kurang tingkat kepercayaan terhadap aparat desa yang ada di desa sungai kunyit hulu, apabila dilakukan pendataan selalu dianggap tidak ada gunanya dengan bahasa “pendataan terus tidak ada gunanya” maka hal ini masih menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakam SDGs dan juga ketika pendataan dilakukan masyarakat selalu beranggapan akan mendapatkan bantuan dari pemerintah desa maupun dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk barang, maka dalam hal terapan SDGs di Desa Sungai Kunyit Hulu masih ada masalah yang perlu dicari jalan keluarnya demi mensukseskan pembangunan berkelanjutan demi menciptakan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam menuntaskan kemiskinan di Desa Sungai Kunyit Hulu. Sehingga akan menjadi pertanyaan besar dimasa saat ini apakah hal yang terkandung dalam menuntaskan kemiskinan dalam SDGs sudah ada terapan baik dalam bentuk program atau pun dalam hal pelaksanaan di Desa Sungai Kunyit Hulu untuk menciptakan kemajuan masyarakat dalam hal penuntasan kemiskinan.

Pentingnya peranan aparat negara khususnya pemerintah desa, maka perlu mempunyai cara kerja yang formal dan profesional melalui uji kompetensi yang memadai. Guna mencapai *competitive advantage* yang berkelanjutan, maka fokus strategi sumber daya manusia harus segera disesuaikan. Prestasi suatu organisasi tidak terlepas dari prestasi setiap individu yang terlibat di dalamnya yang berdampak langsung dengan kepuasan kerja. Pengembangan penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan uji kompetensi, supaya kualitas pegawai dapat terus ditingkatkan (Widhiastana dkk, 2017).

Lingkungan kerja yaitu kondisi lingkungan tempat melaksanakan pekerjaan dengan suasana yang kondusif sehingga dapat memberikan motivasi dan kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan untuk mencapai kesesuaian pada persyaratan produk. Lingkungan kerja mencakup segala sesuatu yang ada di sekitar pegawai pada saat bekerja, baik yang berbentuk fisik ataupun nonfisik, langsung atau tidak langsung, yang dapat mempengaruhi dirinya dan pekerjaannya pada saat bekerja (Triastuti, 2018).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengadakan penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam penuntasan kemiskinan di Desa Sungai Kunyit Hulu Kabupaten Mempawah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada terapan yang efektif dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Sungai Kunyit Hulu Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat yang berkelanjutan, baik dalam bentuk program atau peraturan dalam penuntasan kemiskinan seperti yang diharapkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) membangun negeri dari Desa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Bogdan Dan Taylor dalam Moleong (2014:4) penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati menurut mereka pendapat ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi harus memandangnya sebagai bagian dari sebuah keutuhan. penentuan informan adalah 1 Bapak Kepala Desa dan Kaur Keuangan dengan teknik Purposive Sampling. Instrumen penelitian berupa Interview Guide, Catatan Observasi dan Peneliti Sendiri. Data yang ditemukan peneliti dilapangan berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dianalisis dengan mereduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan atau keakuratan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dilakukan menggunakan teknik trianggulas

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengacu pada Edwards III, 1980 dalam Subarsono (2005:90) terdapat empat variabel yang memberikan pengaruh terhadap implementasi kebijakan, yaitu:

Pertama, komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor menegetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Kedua, sumberdaya. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, maupun sumberdaya non manusia.

Ketiga, disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis.

Keempat struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

setelah melihat dari beberapa aspek yang ada dilapangan dengan yang ada di pemerintahan desa sejak tahun 2010 – 2023 mengalami perkembangan dengan baik, tetapi secara garis besar pekembangan penuntasan kemiskinan tidak sepenuhnya efektif dikarenakan keterbatasan partisipatif personalia yang ada di pemerintah desa dan program yang masih sedikit tersebut. maka hal itu disadari oleh pemerintah desa Sungai Kunyit Hulu Kalimantan Barat ditahun 2022 – 2023 dengan mendata ulang masyarakat yang terlewatkan dalam memperoleh bantuan, dengan diadakan program tambahan oleh pemerintah setempat seperti bantuan langsung tunai, bantuan beras miskin, dalam bantuan bagi desabelitas, maka secara perkembangan dalam penuntasan kemiskinan mulai meningkat 7.84% dari yang awalnya hanya 4.23%. Dan juga dalam hal pemenantasan kemiskinan di desa juga disemapain di PERATURAN MENTRI DESAA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 8 TAHUN 2022, TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023. Pemulihan dana desa adalah hak dan wewenang desa, sehingga pemerintah desa berhak menggunakan dan mengimplementasikan dana desa untuk pertumbuhan SDM baik maupun dalam penuntasan kemiskinannya. Maka menurut Jalaluddin, S.S selaku kaur keuangan desa sungai kunyit hulu permtumbuhan dan perkembangan desa dari tahun ketahun mulai meningkat berdasarkan indek perkembangan yang ada di data pemerintah desa sendiri, contohnya seperti penyaluran bantuan yang sudah terprogram sudah mulai tepat sasaran, walaupun masih ada pro kontra dari pihak masyarakat yang tidak memperoleh bantuan tersebut dan itu wajar, dan juga saat ini desa sangat mengutamakan perkembangan desa khususnya dalam penuntasan kemiskinan setelah pandemic Covid-19, desa akan membuat kartu sepeti ID CARD yang bisa jadi seperti kartu ATM bagi yang mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) supaya lebih efektif dalam pencairan bantu dan desa tidak lagi mencair dengan dipnaggil desa sudah cukup dikasih tahu melauai via *whatss up* sudah bisa diambil dimesin ATM BANK KALBAR.

FAKTOR PENDUKUNGDAN PENGHAMBAT HAMBATAN

1. FAKTOR PENGHAMBAT

Ada beberapa hambatan yang masih sangat perlu untuk diperbaiki dalam pemerintahan Desa Sungai Kunyit Hulu Kabupaten Mempawah sendiri, diantaranya, sejauh ini personalia masih kurang akan tanggung jawabnya sebagai aparat pemerintah desa seperti masih salinggung menunggu ketika ada persoalan yang perlu diatasi secara cepet. Yang kedua masih bertumpu kepada 1 – 2 orang saja baik dalam pelaporan maupun ketika ada kunjungan kerja dari pemerintah daerah, sehingga persoalan yang paling dalam dalam setiap bidang hanya

orang – orang itu saja. Yang ketiga sistem yang digunakan masih cukup jadul dalam pendataan yang seharusnya sudah menggunakan sistem yang lebih bagus misalnya sistem pendataan dan menfilter katagori miskin penduduk dan perkembangan desa kita tidak melihat secara langsung karena sistem informasinya belum ada, seperti Web desa belum ada yang seharusnya menjadi solusi ketika melihat perkembangan desa setempat.

2. FAKTOR PENDUKUNG

Adapun faktor pendukung dalam implementasi kebijakan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam penuntasan kemiskinan, pemerintah desa melibatkan pemuda dan masyarakat dalam memberikan pengetahuan dalam peuntasan kemiskinan biasanya diakan seperti perkumpulam pemuda seperti ANSOR ataupun mengadakan FGD tentang kemajuan sumberdaya manusia untuk bisa bekembang dan maju secara menyeluruh.

Maka hasil dari penelitian ini implementasi kebijakan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam penuntasan kemiskinan di Desa Sungai Kunyit Hulu Kabupaten Mempawah setelah melihat langsung berjalan efektif melihat dari komunikasinya dalam menyampaikan kemasyarakat, ketika proses implementasinya berjalan dengan baik, meskipun hanya bergantung hanya keberap personalia saja, begitu juga cara penyikapan implementator yang tidak sewena – wena terhadap masyarakat dan juga sistem birokrasinya terstruktur secara garis besar sesuai dengan peran dan fungsi masing – masing, walapaun masih ada beberapa kendala yang masih perlu perbaikan lagi, di internal pemerintah atau di eksternal secara personal maupun secara kelompok, yang mengakibatkan penuntasan kemiskinan yang ada di Desa Sungai Kunyit hulu masih perlu diperbaiki.

KESIMPULAN

Setelah melihat dari pembahsan diatas kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti penuntasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui program desa dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang efektif, walaupun masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki untuk kedepannya demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menuntasan kemiskinan, dan desa juga sudah mengupayakan untuk memberikan bantuan sesuai dengan ketentuan yang ada demi mweujudkan desa tanpa miskinan dengan lebih memperhatikan sepada masyarakat yang layak utuk diberi bantuan bukan karena kerabat ataupun keluarga dekat.

Saran yang akan diberikan kepada pemrintah Desa Sungai Kunyit Hulu Kabupaten Mempawah harus lebih kompak lagi dalam menjalan amanah masyarakat baik secara personal maupun kelompok, supaya tetap aman damai dan nyaman dalam melaksanakan tugas. Yang kedua supaya membuat WEB khusus desa sendiri supaya kita masyarat juga bisa melihat secara langsung bagaimana perkembangan desa dan juga harus lebih selektif dalam memilih calon penerima bantuan dengan sesuai aturan yang ada tidak boleh dikurangi dan tidak boleh dilebihi.

REFERENSI

- Abdul Wahab, Solichin. 2005. Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- G Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Halim A. Iskandar. 2020. SDGs DESA percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan, Yayasan pustaka obor Indonesia Anggota IKAPI. DKI jakarta.
<https://kemendes.go.id/berita/view/detil/3423/kemendes-pdtt-prioritaskan-penggunaan-dana-desa-2021-dorong-capaian-sdgs>.
- Islamy, M. Irfan. 2000. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta. Sinar Grafika

- International European Environment Agency, 2020, Partnership for common implementation of environment sustainable development goals//UNEP/GRID-Center,poland.
- International NGO Forum on Development. (2015). Outcome Document Transforming Our World: The 2030 Agenda of Sustainable Development.
- Ishartono & Santoso Tri Raharjo, Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan, Social Work Journal, Volume 6, Nomor 2. ISSN 2528-1577(e)
- Laporan UNDP Indonesia. (2015). Konvergensi Agenda Pembangunan. Nawa Cita, RPJMN, and SDGs. Jakarta: UNDP Indonesia
- Susiana, S. (Ed.). (2015). Pembangunan berkelanjutan: dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. P3DI Setjen DPR.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Dan R&D. Bandung. Alfabeta.
- Setyawan Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang. Delegasi Media.
- Moleong, Lexy, J. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Sugiono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Dan R&D*. Cetakan Ke 17. Bandung. Alfabeta.
- Surya, Dharma,(2008). Pendekatan, Jenis dan Metode Penelitian. Direktorat Pendidikan. Jakarta
- Triastuti, D.A. (2018). Pengaruh Lingkungan Kerja, Kompetensi dan Iklim Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai. Program Studi Manajemen Pascasarjana Universitas Galuh Ciamis. Journal of Management Review, 2(2), 203-208. ISSN-P: 2580-4138/issn-E2579-812x. DOI: <http://dx.doi.org/10.25157/jmr.v2i2.1796>
- Wisnumurti, A. A. G. O., Darma, I. K., & Suasih, N. N. R. (2018). Government Policy of Indonesia to Managing Demographic Bonus and Creating Indonesia Gold in 2045. Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), 23(1), 23-34.
- Widhiastana, D.N., Wardana, M., & Sudibya, I.G.A. (2017). Pengaruh Lingkungan Kerja dan Penghargaan Terhadap Kreativitas dan Kinerja Pegawai di Universitas Pendidikan Ganesha. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 6.1 (2017): 223-250 223 ISSN : 2337-3067